PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

SPIRAL OF SILENCE; Gerakan Elite Lokal Dalam Pemekaran Wilayah Gambut Raya

Muhammad Luthfi Farizan[1], Setia Budhi[2], Ismar Hamid[3]
Progam Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat
Email : 1710415310016@mhs.ulm.ac.id

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan pemekaran wilayah Gambut Raya, apa saja alasan yang mendorong pemekaran, apa saja strategi yang dilaksanakan, bagaimana dinamika-dinamika yang terjadi pada gerakan pemekaran wilayah Gambut Raya dan seperti apa fenomena yang dihubungkan dengan teori *spiral of silence* pada gerakan pemekaran wilayah Gambut Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dasar penelitian adalah studi kasus atau *case study*. Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu *desk review* dan penelitian lapangan dengan instrument observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada gerakan pemekaran wilayah Gambut Raya terdapat keterlibatan dan peran aktif dari pihak elite lokal yang mempunyai karakteristik *spiral of silence*. Terdapat alasan-alasan yang menjadi mendorong keinginan pemekaran, yakni pelayanan birokrasi, isu pembangunan dan kepadatan penduduk. Strategi yang dilaksanakan adalah melakukan pendekatan dengan sosialisasi terhadap masyarakat dan pendekatan dalam bidang media. Hambatan pada gerakan terbagi menjadi dua, internal dan eksternal, internal berkaitan dengan kondisi internal organisasi pemekaran dan eksternal berkaitan dengan relasi dengan kabupaten induk. Dalam kaitannya dengan teori *spiral of silence*, media menjadi salah satu kekuatan terbesar gerakan dimana tokoh-tokoh Gambut Raya terlibat langsung dengan pembentukan wacana di media. Terdapat juga bentuk-bentuk simbolisasi penguasaan wacana yang menjadikan pihak elite lokal Gambut Raya memiliki daya tawar sebagai mayoritas dalam pemekaran wilayah.

Kata kunci: *spiral of silence*, *gerakan*, *elite lokal*, *pemekaran wilayah*

I. PENDAHULUAN

Berakhirnya masa kepemimpinan rezim Orde Baru pada tahun 1998 menandai fase baru tatanan kehidupan bernegara di Indonesia. Tuntutan agar terbukanya ruang-ruang liberalisasi politik dan perbaikan kualitas pembangunan di tengah kehidupan masyarakat menjadi sekian dari banyaknya agenda-agenda besar reformasi. Konsekuensi mendasar dari agenda reformasi tersebut pun kemudian tercermin pada semangat untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya (Huda & Heryansyah, 2019). Keinginan kuat agar daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri ini berasal dari kritik terhadap sistem pembangunan yang sebelumnya bersifat sentralistik pada pemerintah pusat. Besarnya peran pusat

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

terhadap daerah akhirnya memunculkan dampak pada ketidakmampuan daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dianggap strategis dan penting. Akibatnya ketika Indonesia mengalami masa-masa krisis, daerah yang bergantung (baik secara kebijakan maupun keuangan) terhadap pemerintah pusat mengalami ketidakberdayaan (Azikin, 2018).

Arah pembangunan negara pun mengalami perubahan dari yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralistik dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian direvisi pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) yang mempertegas kesempatan dan peluang otonomi daerah yang lebih luas. Adapun pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui Undang-Undang tersebut juga menghadirkan paradigma baru konsep pembangunan yang sebelumnya berprinsip pada efisiensi dan pertumbuhan yang kemudian bergeser kepada prinsip kemandirian dan juga keadilan. Penerapan nilai-nilai dan tujuan otonomi daerah pada praktiknya kemudian dilaksanakan dalam bentuk pemekaran wilayah yang merupakan konsekuensi dari perubahan paradigma pembangunan negara (Muqoyyidin, 2016). Pelaksanaan pemekaran wilayah diatur dan ditetapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007 yang membahas tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

Pemekaran wilayah kemudian dianggap merupakan salah satu solusi untuk dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memangkas jarak birokrasi yang ada di suatu daerah. Tetapi pasca reformasi terdapat realitas bahwa wacana pemekaran suatu wilayah mengalami pergeseran makna dan lebih banyak berkutat sebagai sebuah perwujudan gerakan elite (baik di tingkat pusat ataupun lokal). Elite sendiri menurut pengertian sosiolog Italia Vilfredo Pareto (1935) adalah merupakan orang-orang atau setiap individu yang berhasil serta mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan suatu masyarakat. Masyarakat sendiri terdiri dari 2 (dua) kelas, yaitu: (1) lapisan atas, yaitu elite, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*, seperti politisi, birokrat dll.) dan elite yang tidak memerintah (*non-governing elite*, tokoh masyarakat, intelektual/akademisi, ormas dll.); (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elite. Keterkaitan elite dengan pemekaran wilayah sendiri cukup kuat, oleh sebab wacana pemekaran selalu dimulai dari aspirasi elite-elite lokal dan kelompok-kelompok masyarakat di suatu wilayah yang kemudian melibatkan penggalangan massa (Rohmah, 2018). Sehingga kebijakan pemekaran wilayah cenderung didominasi oleh proses-proses politis daripada proses teknokratis.

Selanjutnya, Rohmah (2018) menyatakan pada prosesnya seringkali wacana pemekaran wilayah juga memunculkan konflik antara elite lokal daerah induk dengan elite lokal daerah pemekaran. Dalam hal ini konflik dapat terjadi secara manifes (terlihat) maupun laten (tidak terlihat). Dimana, konflik antar kedua belah pihak tersebut lahir sebagai

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

bentuk respon yang dilandasi oleh berbagai faktor seperti faktor politis, sosiologis, religius hingga historis berkaitan dengan pemekaran wilayah. Di Indonesia sendiri tahapan pemekaran wilayah secara resmi dapat diawali dengan pengajuan proposal kepada pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) baik yang berada di tingkat kabupaten/kota atau provinsi sebelum akhirnya melakukan pengajuan kepada pemerintah pusat melalui DPR-RI, DPD-RI dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, terdapat beberapa kondisi kekhususan dimana kebijakan untuk memekarkan wilayah berasal dari inisiatif pusat sendiri, seperti pemekaran 3 (tiga) provinsi di Pulau Papua yang disahkan DPR-RI pada April 2022 dengan membentuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Nurita, 2022), yang mana pemekaran ini disebut dengan model pemekaran *top-down* atau berasal dari inisiatif elite. Terdapat juga pemekaran model *bottom-up* yang tidak diinisiasi oleh elite yang berada di pemerintahan (baik pusat, provinsi ataupun kabupaten/kota), tetapi berasal dari aspirasi masyarakat yang kemudian berubah menjadi wacana pemekaran yang pada kemudian hari ditampung oleh elite-elite lokal yang berada diluar pemerintahan. Secara empiris, dinamika elite lokal seperti pertarungan wacana, negosiasi dan lobby-lobby akan lebih terlihat pada model pemekaran *bottom-up* seperti ini.

Adanya keterlibatan elite baik di tingkat pusat dan lokal dalam setiap wacana pemekaran wilayah merupakan konsekuensi logis dari proses demokratisasi yang melibatkan semua unsur dan lapisan kelas di masyarakat. Menurut Muqoyyidin (2016), keterlibatan elite dan aktor lokal sendiri pada pemekaran merupakan usaha untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dan pengaruh, baik dalam segi politis maupun kemasyarakatan pada wilayah tersebut. Pada konteks merebut legitimasi kekuasaan inilah para aktor dan elite lokal melihat pemekaran wilayah sebuah suatu wadah potensial yang terbuka. Dalam usaha untuk menyukseskan gerakan pemekaran wilayah, terdapat begitu banyak cara salah satunya adalah dengan memproduksi wacana dan opini di tengah masyarakat melalui media, terlebih bagi daerah-daerah yang ingin memekarkan wilayah dengan posisi *bottom-up*.

Hal inilah yang dicetuskan oleh Elisabeth Noelle-Neumann (1974) sebagai teori *spiral of silence* atau spiral keheningan. Morrisan (2013), menyatakan spiral keheningan adalah sebuah teori media yang mencoba menjelaskan bagaimana suatu pandangan mayoritas mempunyai kekuatan menekan pandangan minoritas. Dimana pihak-pihak yang cenderung "dianggap" berada pada posisi minoritas tidak tegas dalam menyampaikan pandangannya. Sebaliknya, mereka yang berada pada posisi mayoritas mempunyai kepercayaan diri terhadap pengaruh dan memiliki dorongan kuat untuk menyampaikan pendapatnya kepada masyarakat lebih luas. Dalam kaitannya dengan pemekaran wilayah, terdapat banyak kasus dimana pemekaran wilayah dianggap merupakan salah satu gerakan kolektif untuk memajukan dan membawa keluar suatu daerah dari ketertinggalan pembangunan. Aktor dan elite yang berkepentingan terkadang memaknai pemekaran wilayah sebagai sebuah perjuangan dan pengabdian. Hal ini yang membuat apabila terdapat usaha dari pihak-

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

pihak luar yang mencoba untuk mempertanyakan dan menjatuhkan rencana pemekaran suatu wilayah dianggap sebagai pihak yang bersebrangan/kontra, dan *framing* sebagai pihak yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat. Anggapan sebagai wakil yang sah dari aspirasi masyarakat, menjadikan aktor-aktor pemekaran wilayah memiliki posisi tawar sebagai mayoritas, sedangkan pihak yang kontra adalah minoritas.

Pada dasarnya keinginan pemekaran tidak dapat dilepaskan dari dinamika yang terjadi di daerah, baik yang berada di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Begitu juga dengan Provinsi Kalimantan Selatan, pada masa pasca reformasi daerah ini juga mengalami beberapa pemekaran wilayah seperti, pemekaran Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar (1999), pemekaran Kabupaten Balangan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (2003) dan pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dari Kabupaten Kotabaru (2003). Hingga pada dewasa ini di Provinsi Kalimantan Selatan kembali menguat keinginan untuk memekarkan wilayah, antara lain rencana pemekaran Kabupaten Gambut Raya dari wilayah Kabupaten Banjar dan rencana pemekaran Kabupaten Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru. Hingga saat ini rencana tersebut terus digulirkan, dimana pihak-pihak yang terlibat terus menggalang suara baik di tingkat daerah maupun pusat. Dimana salah satu yang penulis cermati adalah gerakan pemekaran wilayah Gambut Raya yang ada di Kabupaten Banjar.

Kabupaten Banjar adalah salah satu dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terdiri dari 20 kecamatan, 13 kelurahan dan 277 desa yang tersebar dan terdiri dari berbagai bentang alam seperti dataran rendah, pesisir hingga wilayah dataran tinggi (pegunungan Meratus). Sebagai kabupaten yang memiliki problematika kewilayahan yang cukup kompleks, Kabupaten Banjar dihadapkan pada isu pembangunan yang masih belum merata, pelaksanaan birokrasi pemerintahan terhadap masyarakat yang dianggap masih belum efektif (jarak terhadap ibukota kabupaten yang jauh) dan juga faktor kepadatan penduduk di beberapa wilayah. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi pemicu serta menjadi aspirasi yang disuarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang menghendaki adanya pemekaran pada wilayah bagian barat Kabupaten Banjar dan sekitarnya menjadi kabupaten tersendiri bernama Gambut Raya. Gambut Raya sendiri direncanakan terdiri dari 6 (enam) wilayah kecamatan Kabupaten Banjar yaitu, Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh, Tatah Makmur serta Beruntung Baru, dan terdiri dari 86 desa dan 6 kelurahan (BPS Kabupaten Banjar, 2022). Menurut Budhi dan Hidayah (2021), daerah ini didominasi oleh lahan pertanian dan merupakan lumbung pangan di Kabupaten Banjar. Selain sektor pertanian terdapat juga berbagai sektor seperti industri jasa, perhotelan, perumahan, pergudangan dan sektor swasta lainnya.

Sebagai usul pemekaran yang inisiatif nya tidak berasal dari elite yang berada pada pemerintahan, keinginan pemekaran Gambut Raya awalnya tidak begitu mendapat respon yang positif dari pihak DPRD Kabupaten Banjar, disebabkan banyaknya kendala aturan, sehingga desakan pemekaran Gambut Raya

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

mengalami pasang surut, kemudian menghilang dengan sendirinya (Radar Banjarmasin, 2017). Bupati Banjar (2015-2021) juga menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pemekaran dengan alasan bahwa Gambut Raya belum saatnya untuk menjadi daerah/kabupaten yang berdiri sendiri (Arfianty, 2019). Melalui hal ini, dapat terlihat bahwa pada proses pembentukan Gambut Raya menunjukkan sebuah dinamika antar elite, yakni antar elite lokal Gambut Raya dan elite lokal Kabupaten Banjar. Dalam hal ini, tokoh-tokoh elite lokal Kabupaten Banjar selama dalam beberapa dekade pemerintahan tidak menunjukkan dukungan untuk terjadinya pemekaran, sementara tokoh-tokoh elite lokal Gambut Raya berkepentingan dalam terbentuknya Kabupaten Gambut Raya. Dimana hal ini berdasarkan kepercayaan tokoh-tokoh elite lokal Gambut Raya bahwa daerah ini siap dan mempunyai potensi yang besar untuk menjadi kabupaten yang berdiri sendiri, salah satunya dengan pemaparan data bahwa kecamatan yang direncanakan untuk mekar menjadi Gambut Raya memiliki andil dalam menyumbangkan 35 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Banjar (Fadhilah, 2018).

Wacana pemekaran Gambut Raya sendiri muncul pertama kali pada tahun 1998. Munculnya gagasan pemekaran ini merupakan sebuah kritik dari kondisi pembangunan di wilayah yang saat itu masih terdiri 4 (empat) kecamatan (Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Gambut dan Aluh-Aluh). Namun, pada awal kemunculannya wacana pemekaran Gambut Raya memang lebih dominan diinisiasi oleh tokoh-tokoh elite lokal yang ada di lingkungan birokrat, politik dan intelektual. Syahruji (dalam Khaitami, 2016) mengatakan bahwa ketika pertama kali muncul wacana Gambut Raya nyaris tidak diketahui oleh masyarakat banyak, oleh sebab wacana ini hanya bergulir di kalangan elite dan nyaris tidak ada dukungan kepala desa dan tokoh masyarakat (yang lebih luas). Begitu juga dengan susunan panitia yang terhimpun dalam Panitia Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya (P3KGR) pada masa ini (2018-sekarang) yang mayoritas di isi oleh tokoh-tokoh elite lokal, walaupun pada pelaksanaan keinginan pemekaran saat ini mengalami perubahan strategi yang lebih mengedepankan pendekatan serta peran dari bawah (masyarakat).

Gerakan pemekaran Gambut Raya merupakan salah satu fenomena gerakan yang memiliki karakteristik elite lokal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini tercermin dari keterlibatan dan bagaimana usaha-usaha elite lokal Gambut Raya dalam gerakan pemekaran wilayah. Dalam hal ini, peneliti fokus mengkaji apa saja motivasi-motivasi yang mendorong keinginan pemekaran, bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh elite lokal Gambut Raya dalam usaha pemekaran dan bagaimana dinamika-dinamika yang terjadi pada gerakan pemekaran wilayah itu sendiri yang dikaji dengan teori *spiral of silence*. Penelitian ini mencoba untuk memberikan perspektif tentang bagaimana elite lokal Gambut Raya dalam melaksanakan gerakan pemekaran wilayah. Subjek dari penelitian ini adalah pihak elite lokal yang terlibat dalam gerakan pemekaran Gambut Raya, Provinsi Kalimantan Selatan.

PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakkan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dasar penelitian ini sendiri adalah studi kasus atau *case study*, menurut Sugiarto (2017: 12) studi kasus adalah sebuah penelitian kualitatif yang mendalam berkaitan dengan individu, kelompok-kelompok, institusi dan sebagainya dalam jangka waktu tertentu. Dasar dari penelitian ini berusaha untuk dapat menemukan makna, meneliti sebuah proses, serta mendapatkan pengertian serta pemahaman mendalam dan utuh dari individu, kelompok atau situasi tertentu. Tahapan penelitian ini dimulai dengan melakukan *desk review* atau menelurusi data-data yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Salah satunya adalah dengan memperhatikan aktivitas, pola dan bagaimana pemberitaan media di internet yang berkaitan dengan pemekaran Gambut Raya. Melalui hasil *desk review* ini penulis menemukan gambaran serta temuan awal yang berkaitan dengan rencana pemekaran Gambut Raya.

Penulis melaksanakan penelitian dari Agustus 2021 s.d Maret 2022. Adapun lokasi penelitian disesuaikan dengan kebutuhan dan keberadaan informan yang berada di Kota Banjarmasin dan Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Informan dalam penelitian ini adalah para tokoh-tokoh Gambut Raya yang terlibat dalam rencana pemekaran Gambut Raya. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, serta diperkuat dengan data sekunder dari *desk review*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman. Analisis ini melalui tiga langkah, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016: 246).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tokoh-Tokoh Elite Lokal Yang Dominan Dalam Gerakan Pemekaran Wilayah Gambut Raya

Dalam melaksanakan gerakan pemekaran wilayah Gambut Raya, para tokoh elite lokal Gambut Raya terhimpun dalam sebuah organisasi internal bernama Panitia Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya (P3KGR). Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dan berperan penting dalam gerakan pemekaran Gambut Raya adalah:

1. Dr. (HC.) H. Supian HK, S.H., M.H. – Ketua Umum Panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan periode 2019-2023.
2. H. Pangeran Gusti Abidinsyah, S.Sos., M.M. – Wakil Ketua Umum Panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan/Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan periode 2019-2023.
3. H. Muhammad Yunani D, S.E – Wakil Ketua Umum Panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya dan anggota DPRD Kabupaten Banjar/anggota Komisi III DPRD Kabupaten Banjar periode 2019-2023.
4. H. Suripno Sumas, S.H., M.H. – Tokoh pencetus/mantan Ketua Umum Panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya dan

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan/Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan periode 2019-2023.

5. H. Aspihani Ideris, S.A.P., S.H., M.H. – Sekretaris Umum Panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya, tokoh pencetus, akademisi, advokat dan tokoh LSM.

Selain figur-figur tokoh di atas, terdapat juga tokoh-tokoh elite lokal Gambut Raya lain yang ikut men- support gerakan pemekaran Gambut Raya di luar dari nama tokoh-tokoh internal yang disebutkan, termasuk juga tokoh masyarakat, ulama, akademisi dan masyarakat pada umumnya.

Penulis juga menggunakan istilah elite lokal Kabupaten Banjar sebagai penggambaran tokoh-tokoh kabupaten induk yang ikut terlibat (dalam hal ini ikut mewarnai sejarah, gagasan dan argumentasi) terkait pemekaran Gambut Raya. Adapun tokoh-tokoh yang termasuk elite lokal Kabupaten Banjar adalah mereka yang menduduki jabatan pemerintahan/publik baik eksekutif (Bupati Banjar sekarang/terdahulu), legislatif (DPRD Banjar sekarang/terdahulu), termasuk politisi serta pihak-pihak yang berdomisili dan memiliki afiliasi terhadap kepentingan dalam ruang lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar.

b. Latar Belakang dan Dinamika Elite Lokal Dalam Gerakan Pemekaran Wilayah (Motivasi, Strategi dan Hambatan)

Gerakan pada dasarnya adalah sebuah aktivitas sosial yang secara spesifik berfokus pada isu-isu sosial, budaya, atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial (Widyanta, 2002). Dalam sosiologi, gerakan sendiri dijelaskan sebagai bentuk prilaku kolektif yang disebut dengan gerakan sosial. Giddens (1993: 642) menjelaskan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif bertujuan untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.

Gerakan pemekaran wilayah yang di inisiasi oleh elite lokal di Indonesia pada dasarnya terdiri dari berbagai alasan dan sebab yang hadir sebagai pendorong. Hal ini yang juga terdapat pada wacana Gambut Raya. Kemunculan Gambut Raya yang pertama kali tercetus pada 23 Januari 1998 di Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk. Menurut para tokoh-tokoh yang terlibat kemunculannya didasari oleh berbagai proses dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan seperti pembangunan yang tertinggal, jarak terhadap ibukota kabupaten (Martapura) yang sangat jauh dan juga menyangkut terputusnya hubungan emosional yang dipicu oleh kecemburuan sosial akibat mekarnya Kotif (Kota Administratif) Banjarbaru, menjadi Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar turut menguatkan sentimen "di anak tirikan" bagi daerah ini. Walaupun kemudian wacana pemekaran ini mengalami pasang surut dan pucuk pimpinan yang silih berganti di tingkat Kabupaten Banjar, permasalahan pembangunan dan birokrasi dirasa masih menjadi hambatan utama. Bahkan setelah kecamatan yang berada di daerah ini sudah berkembang menjadi 6 (enam). Salah satu hal yang paling disoroti adalah dalam proses pencatatan sipil (KTP) dimana

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

masyarakat wilayah 6 (enam) kecamatan harus ke ibukota kabupaten Martapura yang dianggap jauh dan memakan waktu. Hal ini yang menurut pihak elite lokal Gambut Raya bahwa hadirnya keinginan pemekaran wilayah ini seharusnya menjadi bahan refleksi oleh pihak elite lokal Kabupaten Banjar, bahwa terdapat isu-isu pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi di 6 (enam) wilayah kecamatan ini.

Alasan-alasan selanjutnya yang menjadi dasar keinginan pemekaran juga berkaitan dengan penegasan tujuan, dimana pihak elite lokal Gambut Raya mengatakan bahwa gerakan pemekaran yang dilaksanakan oleh pihak panitia yang ada pada saat ini bukanlah sebuah gerakan yang dilaksanakan oleh pihak konglomerat/pemodal, akan tetapi gerakan pemekaran ini dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki modal kepercayaan diri (semangat) yang tinggi. Adapun, modal kepercayaan diri ini menyangkut sebuah harapan agar masyarakat yang berada di wilayah Gambut Raya kelak dapat lebih sejahtera. Keinginan ini juga diperkuat oleh tekad bahwa Gambut Raya tidak boleh diciderai oleh kepentingan-kepentingan sementara dan individual yang mencoba untuk "menjual Gambut Raya". Hal ini ditegaskan bahwa dalam bergerak panitia Gambut Raya mengandalkan swadaya dari masyarakat dan tidak memiliki donatur dari pihak ketiga (Husaini, 2018). Dengan adanya keberadaan Gambut Raya diharapkan akan membuat dana-dana dari pemerintah pusat akan masuk, yang akan membuat proses pembangunan berlangsung lebih cepat di wilayah ini.

Berkaca pada potensi kewilayahan yang ada di 6 (enam) kecamatan, tokoh-tokoh elite lokal Gambut Raya melihat bahwa wilayah ini memiliki peranan yang sama dengan daerah Jabodetabek, dimana Gambut Raya akan memiliki peran sebagai daerah penyangga untuk Kota Banjarmasin atau yang lebih dikenal dengan istilah Banjarbakula. Banjarbakula sendiri adalah salah satu wilayah metropolitan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini meliputi Kota Banjarmasin dan daerah penyangganya seperti Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut. Dimana sebagian wilayah Kabupaten Banjar yang termasuk Banjarbakula adalah Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Aluh- Aluh dan Beruntung Baru (Anugrah dan Anward, 2020). Potensi kewilayahan yang menjadi ciri khas Gambut Raya sendiri adalah terletak pada sektor pertanian nya, dimana mayoritas wilayah enam kecamatan ini didominasi oleh pertanian serta merupakan daerah produksi pertanian bagi Kabupaten Banjar. Sehingga setengah dari lahan pertanian Kabupaten Banjar berada pada wilayah ini (Budhi dan Hidayah, 2021). Perbedaan karakteristik sosio-budaya dan alam juga menjadi salah satu pertimbangan pemekaran. Hal ini yang menurut tokoh elite lokal Gambut Raya bahwa tata kehidupan masyarakat antara daerah Gambut Raya (yang didominasi oleh wilayah pertanian dataran rendah/pesisir) dan daerah induk Kabupaten Banjar (yang berada di daerah pegunungan) memiliki perbedaan. Oleh karenanya perbedaan ini seharusnya di akomodir dengan membentuk daerah dengan pola kebudayaan dan kehidupan yang sama, sehingga

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

pembangunan dapat menyesuaikan dengan identitas kewilayahan daerah itu sendiri.

Selain potensi pertanian, potensi ekonomi di wilayah Gambut Raya juga diakui cukup besar, dimana terdapat sebuah konsep kemandirian bahwa daerah ini tidak akan di topang oleh industri ekstraktif (pertambangan) ataupun perkebunan monokultur (sawit). Sehingga fokus nya adalah pada perencanaan tata ruang dan pendapatan daerah yang mempersiapkan daerah-daerah yang memiliki potensi investasi seperti pada sektor jasa, perumahan, pelabuhan, pemerintahan hingga pendidikan. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi melalui pajak reklame, hotel dan tempat hiburan juga memiliki potensi untuk dapat menghidupi keuangan daerah, diluar dari dana yang masuk dari pemerintah pusat ataupun dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sehingga Gambut Raya menjadi daerah mandiri yang memiliki pelayanan administrasi dan investasi yang baik. Hal ini yang disoroti oleh tokoh-tokoh Gambut Raya bahwa potensi ini yang saat ini belum dikembangkan oleh pihak kabupaten induk.

Ketika dikaitkan dengan isu politis, apakah gerakan ini berkaitan dengan motivasi untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan di Gambut Raya kelak, tokoh elite lokal Gambut Raya berpandangan bahwa isu tersebut hadir sebagai upaya untuk mendiskreditkan gerakan ini. Sebab keinginan pemekaran ini sendiri lahir sebagai perwakilan aspirasi masyarakat dan bukan wujud keinginan perorangan. Hal ini dijelaskan, bahwa ketika nanti Gambut Raya terbentuk yang menjadi kepala daerah (bupati) adalah Penjabat Bupati (Pj) yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bukanlah pihak panitia Gambut Raya. Dalam hal ini tokoh elite lokal Gambut Raya mengatakan belum tentu pihak mereka yang "berjuang habis-habisan" akan otomatis menjadi kepala daerah. Hal ini karena pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan umum, yang memperbolehkan semua orang yang mempunyai kemampuan, kapasitas dan potensi untuk mencalonkan diri. Seperti yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

> *"Kalau ditakunakan handak jadi bupati, seberataan handak jadi bupati, ya kalo, siapa yang kada handak, tapi ikuti mekanisme nya, siapa aja silahkan, asal memenuhi syarat"*
>
> Artinya, kalau ditanya mau jadi bupati, semuanya ingin jadi bupati, ya kan, siapa yang tidak mau, tapi ikuti mekanisme nya, siapa saja silahkan, asal memenuhi syarat.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa elite lokal Gambut Raya memang belum fokus terhadap *outcome* yang berkaitan dengan isu-isu kepemimpinan daerah, dimana saat ini pihak elite lokal Gambut Raya masih berfokus pada *goals* untuk menyukseskan gerakan melalui target-target kerja yang sudah ditentukan, dalam hal ini berkaitan dengan mendapatkan rekomendasi dari pihak kabupaten induk melalui DPRD Kabupaten Banjar dan Bupati Kabupaten Banjar. Dari penjabaran mengenai alasan-alasan munculnya keinginan pemekaran, terlihat bahwa terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan *basic needs* masyarakat yang coba dipenuhi melalui pemekaran wilayah

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

Gambut Raya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Praktino dan Hanif (dalam Santoso, 2006: 5-6) bahwa alasan dan isu yang sering dipakai dalam pemekaran adalah 1) kebutuhan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan 2) wilayah geografis yang terlalu luas 3) basis identitas yang berbeda 4) gagalnya pengelolaan konflik komunal berkaitan dengan argumentasi dan aspirasi politik. Burhan (2020) juga menjelaskan, bahwa argumentasi "terisolasi" baik secara ekonomi maupun pembangunan menjadi gagasan yang punya dampak besar terhadap perkembangan isu mengenai pemekaran itu sendiri di tengah masyarakat.

Selain alasan-alasan yang hadir sebagai penguat keinginan pemekaran wilayah seperti yang sudah dijelaskan di atas, tokoh-tokoh elite lokal Gambut Raya juga melaksanakan berbagai strategi untuk menyukseskan gerakan pemekaran wilayah. Namun, berdasarkan pengalaman sejarah, tokoh-tokoh Gambut Raya menyadari dan memahami bahwa kelemahan terbesar gerakan ini ketika muncul pertama kali pada tahun 90an adalah pada pendekatan kepada elemen masyarakat, sehingga membuat gerakan ini rentan mengalami pasang-surut. H. Syahruji (dalam Widodo, 2016) yang juga merupakan salah satu tokoh awal dan pihak panitia Gambut Raya juga mengkonfirmasi bahwa wacana pembentukan Gambut Raya pada waktu itu (90an) cenderung hanya berkembang ditingkat elite dan gerakan berlangsung secara tertutup. Berkaca pada pengalaman itu, ketika wacana Gambut Raya muncul kembali pada medio tahun 2013 maka terjadi perubahan cara dan strategi gerakan yang lebih mengedepankan keterlibatan elemen masyarakat.

Adapun, pendekatan-pendekatan yang dilaksanakan oleh tokoh panitia adalah seperti melaksanakan sosialiasi dan pertemuan yang memperkenalkan tentang wacana pembentukan Gambut Raya. Dalam hal ini pihak Gambut Raya melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh alim ulama, kepala desa, masyarakat, kelompok pemuda/organisasi di 86 desa dan 6 kelurahan yang berada di 6 (enam) wilayah kecamatan. Pelibatan elemen masyarakat ini bertujuan agar terjadi kesamaan visi tentang Gambut Raya dan bagaimana solusi yang dianggap tepat terkait pemekaran wilayah ini. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan agar Kepala Desa dan BPD dapat memberikan rekomendasi dan dukungan kepada rencana pemekaran Gambut Raya. Menurut tokoh Gambut Raya, pendekatan ini terbukti berhasil karena sebagian kepala desa sudah membuat surat pernyataan mendukung terbentuknya Gambut Raya melalui hasil-hasil musyawarah desa yang sudah dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"Kalau kita ingin hitung jumlah karena di enam kecamatan itu ada 92 desa dan kelurahan, maka berarti minimal harus (mendapat dukungan) 80%, itu harus sekitar 74 rekomendasi (dari desa dan kelurahan) yang harus kami penuhi, karena di kementerian juga tidak menyertakan 100%, tapi hanya 80% dari pemerintah desa nya mendukung. (Dan itu) sudah kita lakukan, kita sudah lakukan, tapi tidak, belum mencapai 80%, belum mencapai 80% karena waktu itu kan kita tidak fokus kesana. Dan itu akan kita lanjutkan sehingga kita berharap dukungan terdahulu dengan dukungan yang sekarang ini kalau di

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

jumlahkan akan memenuhi 80% desa dan kelurahan yang ada di Gambut Raya."

Selanjutnya, strategi yang dilaksanakan oleh pihak panitia pemekaran Gambut Raya adalah dengan melakukan pendekatan kepada pihak media, baik surat kabar (cetak/online), radio dan sosial media lainnya (*Whatsapp Group*, *Facebook Group* & *Youtube*). Pendekatan melalui media juga dianggap memberi *impact* yang cukup besar, sehingga dapat membumingkan wacana ini di tengah-tengah masyarakat, dan kemunculannya signifikan dirasa terjadi pada tahun 2015. Pada strategi ini penulis melihat pihak elite lokal Gambut Raya sangat aktif dan terlibat langsung dengan pembentukan wacana di media baik itu berkaitan dengan perkembangan, tanggapan dan argumentasi mengenai pembentukan Gambut Raya.

Keterlibatan politisi senior Kalimantan Selatan H. Supian HK sebagai ketua umum pada pemekaran Gambut Raya juga turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan gerakan ini. Sebagai politisi senior yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan periode 2019-2024, kemampuan yang dimiliki tokoh ini diakui sangat besar dan strategis, hal ini berdasarkan pemaparan oleh tokoh Gambut Raya yang lain bahwa perkembangan dan progress kegiatan yang dilaksanakan semenjak H. Supian HK bergabung Gambut Raya jauh melebihi apa yang tokoh Gambut Raya lakukan dalam 15 tahun sebelumnya. Pengalaman nya dalam menghadapi proses pemekaran juga diakui bukan kali ini saja, diketahui bahwa tokoh yang bersangkutan juga pernah mengakui ikut ambil bagian dalam pemekaran Kabupaten Balangan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2003 (Suara Kalimantan, 2018). Dalam hal ini, Vilfredo Pareto (1935) menyatakan bahwa kehadiran elite di tengah masyarakat merupakan sebuah keniscayaan atau kodrati, hal ini disebakan karena elite dianggap mempunyai kapasitas personal yang lebih unggul dibandandingkan dengan orang kebanyakan (massa). Gaetano Mosca (1939) juga berpendapat bahwa keberhasilan elite untuk dapat berkuasa bukan saja karena mempunyai kelebihan personal, tetapi dikarenakan relatif teorganisir (memiliki perencanaan) dalam berpolitik. Dalam kaitannya dengan pemekaran Gambut Raya terlihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh elite politik merupakan hal yang penting dan merupakan salah satu aspek penunjang dalam kesuksesan dalam melaksanakan gerakan.

Tokoh-tokoh Gambut Raya kemudian mencoba mengajukan permohonan bantuan terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, permintaan bantuan ini sendiri tidak berbentuk dana untuk Gambut Raya, namun pihak panitia meminta bantuan dalam bentuk penelitian yang membahas kelayakan 6 (enam) kecamatan untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), sehingga pihak panitia Gambut Raya akan menerima hasil kajian dari penelitian tersebut. Namun, pada tahun anggaran 2019 hal tersebut tidak dapat dianggarkan karena terjadi *refocusing* anggaran terhadap penanganan pandemi COVID-19 di Kalimantan Selatan. Baru ketika memasuki anggaran tahun 2020-2021 permintaan ini

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

mendapatkan alokasi anggaran. Hasilnya melalui kerjasama yang berlangsung 2 (dua) kali antara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Selatan dan Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat diperolehlah hasil bahwa daerah ini layak untuk dimekarkan dengan 86 persen masyarakat di wilayah 6 (enam) kecamatan mendukung wacana pemekaran. Melalui hasil tersebut pihak panitia percaya hal itu dikarenakan berkat pendekatan-pendakatan mereka yang berhasil mensosialisasikan dan memperkenalkan wacana pemekaran Gambut Raya ini di tengah masyarakat (6) enam kecamatan.

Dengan hasil kerjsama penelitian tersebut yang menyatakan wilayah Gambut Raya layak menjadi kabupaten tersendiri, maka langkah-langkah yang selanjutnya diambil oleh pihak panitia Gambut Raya adalah dengan menghadap Bupati Kabupaten Banjar dan DPRD Kabupaten Banjar untuk menyampaikan aspirasi dan dapatnya keluarnya rekomendasi untuk pelepasan wilayah 6 (enam) kecamatan dari Kabupaten Banjar.

Gerakan pemekaran Gambut Raya juga tentu mengalami berbagai hambatan dan dinamika dalam melaksanakan pemekaran wilayah. Berdasarkan riwayatnya, hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pihak elite lokal Gambut Raya sudah ada sejak pertama kali keinginan untuk memekarkan daerah ini muncul pada tahun 1998. Bukan tanpa sebab, keinginan pemekaran sendiri juga menghadirkan pro dan kontra di tengah masyarakat hingga kepada elite lokal yang berada di kabupaten induk. Menurut tokoh-tokoh panitia Gambut Raya, hambatan dalam gerakan ini terbagi kepada dua bentuk yaitu internal dan eksternal, dimana permasalahan di dalam dua hal ini saling berhubungan dengan satu sama lain.

Berkaitan dengan hambatan internal, hambatan ini dimulai dari permasalahan persyaratan administrasi pemekaran wilayah yang terjadi pada fase-fase awal gerakan, dimana jumlah kecamatan yang tergabung dalam Gambut Raya masih berjumlah 4 (empat) kecamatan dari seharusnya 5 (lima) kecamatan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan jumlah penduduk yang saat itu belum proporsional untuk terjadinya pemekaran. Hambatan itu kemudian berlanjut kepada segi pendekatan yang saat itu terkesan elitis dan kurang masif dalam penggalangan massa yang menyebabkan pihak panitia tidak begitu mendapat support maksimal dari pihak masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh elite politik. Hal ini yang menurut pihak panitia Gambut Raya dijadikan sebagai isu oleh pihak yang kontra terhadap wacana pemekaran, bahwa pemekaran ini adalah bagian dari kepentingan-kepentingan pribadi elite yang mengatasnamakan masyarakat. Susunan kepanitiaan yang kala itu didominasi oleh para birokrat/ASN semakin menguatkan anggapan bahwa pemekaran ini adalah upaya untuk mengejar jabatan yang lebih tinggi.

Terdapat juga persoalan-persoalan internal organisasi yang ikut menghambat gerakan pemekaran wilayah Gambut Raya pada masa itu, dalam hal ini adalah berkaitan dengan meninggal dunia nya Ketua Umum

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

Panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya hasil Musyarawah Besar (Mubes) 22 Juni 2003 yang ke-1 yaitu Drs. Husaini Baderi. Kepergian tokoh ketua umum ini yang diakui kemudian menyebabkan kepengurusan dan gerakan pemekaran tidak berjalan dengan maksimal. Kepengurusan pun disepakati dilanjutkan oleh H. Suripno Sumas, S.H., M.H. pada tahun 2007-2008 sebagai ketua. Pada medio kepengurusan ini juga diakui oleh pihak tokoh Gambut Raya bahwa terjadi bentuk-bentuk hambatan yang berasal dari luar (eksternal) kepengurusan panitia, dalam hal ini adalah bagaimana respon oleh kabupaten induk melalui Pemerintah Kabupaten Banjar yang dianggap mempunyai sikap bersebrangan dan aktif untuk meng *counter* gerakan ini di ranah media. Seperti yang dijelaskan oleh informan:

> *"Nah di perjalanan, kami masih tetap di counter oleh mereka yang tidak sependapat tadi, sehingga aktivitas kita itu selalu, di lawan atau di counter lah. Misalnya (ketika) kita ekspose di koran, maka nanti ada (juga) counter di koran, kita di wawancarai oleh TVRI (Kalimantan Selatan), dua-tiga hari kemudian Humas dari Pemerintah Kabupaten Banjar juga wawancara dengan TVRI, begitu juga apa namanya (ketika kami) berbicara di (radio) Nusantara FM dan RRI, mereka juga mengambil langkah (yang sama). Nah sehingga perjalanan kita itu selalu terhalang, nah maka kami, akhirnya banyak yang sepakat, kami tidak melakukan aktivitas yang gencar tapi kami tetap membuat perencanaan-perencanaan secara internal"*

Akibat dari begitu aktif nya usaha untuk meng *counter* gerakan ini dari pihak kabupaten induk yang lalu kemudian menyebabkan gerakan berjalan di tempat, hal ini yang kemudian berpengaruh terhadap faktor internal gerakan yang juga mengalami berbagai dinamika, seperti tokoh panitia yang terlibat dalam pemekaran sudah banyak yang berkurang, yang mana seperti meninggal dunia serta pindah domisili (keluar dari wilayah enam kecamatan).

Dengan jumlah pengurus yang sudah berkurang banyak, maka pada tahun 2013-2015 terjadi usaha untuk kembali menghidupkan wacana ini dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan pada gerakan pemekaran Gambut Raya. Pembaharuan ini berkaitan dengan strategi pendekatan dari bawah yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Namun pendekatan ini juga mengalami hambatan pada pelaksanaannya, seperti yang dijelaskan oleh tokoh elite lokal Gambut Raya, bahwa selain penolakan yang dilakukan oleh elite lokal Kabupaten Banjar, terdapat juga pada masa itu penolakan dan upaya-upaya untuk menghalangi yang datang dari beberapa pihak Kepala Desa atau *Pambakal* yang berada di 6 (enam) kecamatan. Penolakan ini berkaitan dengan sikap untuk tidak menerima sosialisasi ataupun memberikan dukungan terhadap rencana pemekaran Gambut Raya, walaupun pada perkembangannya penolakan di tingkat desa ini diakui tidak berlangsung begitu lama.

Pergantian pucuk pimpinan di Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2015 juga tidak menunjukkan perubahan posisi dan sikap kabupaten induk dalam

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

memandang wacana Gambut Raya. Hal ini terlihat dari usaha-usaha yang pernah dilakukan oleh pihak Gambut Raya dalam mengirim surat permintaan untuk audiensi ataupun pertemuan/dialog terhadap pihak eksekutif dan legislatif, dimana hasilnya permintaan pihak Gambut Raya tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah kabupaten. Sikap elite lokal Kabupaten Banjar yang digambarkan sebagai "dingin" oleh pihak elite Gambut Raya tersebut juga menjadi kendala dalam melaksanakan gerakan pemekaran. Dimana, bupati Banjar pada masa itu yang masih dijabat oleh K.H. Khalilurrahman juga menunjukkan penolakan dengan tegas, bahwa daerah Gambut Raya belum saatnya menjadi daerah tersendiri, selain itu Bupati Banjar juga berpendapat bahwa persyaratan untuk memekarkan suatu wilayah tidak mudah. Berkaca pada kenyataan ini pihak Gambut Raya berpandangan bahwa keengganan pihak Kabupaten Banjar melepas enam kecamatan ini disebabkan daerah ini memiliki kontribusi besar terhadap pemasukan keuangan Kabupaten Banjar. Adapun perbedaan-perbadaan pandangan antar dua belah pihak akan dijabarkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 1 Tabel Perbedaan Sikap Tokoh Gambut Raya dan Kabupaten Banjar

Elite Lokal Gambut Raya	**Elite Lokal Kabupaten Banjar**
Mendukung dan memperjuangkan wacana pemekaran wilayah Gambut Raya	Menolak, tidak mendukung dan tidak memberikan respon terhadap wacana pemekaran wilayah Gambut Raya
Terdapat permasalahan pembangunan di wilayah enam kecamatan sehingga harus di mekarkan menjadi kabupaten tersendiri	Setuju dengan permasalahan pembangunan yang ada di wilayah enam kecamatan tetapi memandang pemekaran wilayah bukan sebagai solusi
Wilayah enam kecamatan harus dimekarkan karena memiliki potensi ekonomi yang besar	Wilayah enam kecamatan harus dipertahankan karena memiliki kontribusi besar dalam pendapatan daerah Kabupaten Banjar
Keinginan pemekaran wilayah Gambut Raya bukanlah kepentingan elite tetapi kepentingan masyarakat	Keinginan pemekaran jangan hanya berdasarkan ego politik sektoral
Gambut Raya layak dimekarkan berdasarkan hasil riset dan kajian dari Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dan Tim Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat	Harus ada studi kelayakan, riset pembanding dan tanggapan publik yang komprehensif terkait pemekaran Gambut Raya

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

Pada tanggal 1 Januari 2022, Bupati Banjar periode 2021-2024 H. Saidi Mansyur menerima audiensi pihak panitia Gambut Raya yang menandai pertama kali pertemuan terbuka antara pihak Kabupaten Banjar dan pihak Gambut Raya. Pada pertemuan ini bupati menerima hasil kajian awal terkait pemekaran yang dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dan Tim Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat. Bupati Banjar juga menyambut dan mempersilahkan untuk pihak Gambut Raya mempersiapkan segala keperluan terkait pengajuan kepada pihak kabupaten induk, untuk segera di proses secara pemerintahan. Beberapa bulan kemudian pada tanggal 23 Maret 2022, pihak panitia Gambut Raya melakukan pertemuan kembali dengan pihak DPRD Kabupaten Banjar dengan hasil bahwa rencana pemekaran Gambut Raya akan dibahas di lingkup pimpinan DPRD Kabupaten dan akan terjadi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sesuai dengan ranah DPRD Kabupaten Banjar. Melalui dua pertemuan ini juga dapat dimaknai sebagai berakhirnya fase argumentasi dan perdebatan panjang yang selama ini mewarnai sejarah wacana pemekaran wilayah ini. Meyer (2012) mengatakan bahwa kompromi merupakan satu proses yang paling produktif untuk mengatasi ataupun menghindari konflik atas dasar konsensus (kesepakatan bersama). Dalam hal ini sikap untuk berkompromi dan diplomatis Kabupaten Banjar yang diwakili oleh bupati dan pihak DPRD Kabupaten Banjar terhadap kehadiran elite-elite lokal Gambut Raya memberikan ruang untuk menghadirkan konsensus ataupun kesepakatan-kesepakatan baru di wilayah Kabupaten Banjar.

Berdasarkan prosesnya setelah rekomendasi dari Kabupaten Banjar keluar maka tahapan akan berlanjut di tingkat eksekutif dan legislatif Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian akan dilanjutkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, DPR-RI Komisi II dan DPD RI Komisi I yang membidangi tentang urusan dalam negeri (pemekaran wilayah). Setelah proses itu selesai dilaksanakan maka pihak panitia hanya tinggal menunggu apakah usulan ini dipertimbangkan ataupun ditolak. Mengingat, moratorium pemekaran wilayah juga belum dibuka oleh pemerintah pusat, maka tujuan dari gerakan ini adalah pada mempersiapkan daerah apabila kebijakan moratorium dicabut, sehingga Gambut Raya dapat dipertimbangkan menjadi daerah kabupaten persiapan. Pertimbangan pemekaran wilayah menurut tokoh Gambut Raya juga berkaitan dengan potensi keuangan/finansial negara ataupun pertimbangan politik lainnya.

c. *Spiral of Silence* Pada Gerakan Pemekaran Gambut Raya

Pada bagian sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa salah satu strategi yang digunakan oleh pihak panitia Gambut Raya untuk membumingkan wacana ini ditengah masyarakat adalah dengan melalui pendekatan media. Berkaca pada penggunaan nya yang begitu masif dan aktif, penulis melihat bahwa media menjadi salah satu kekuatan terbesar gerakan ini dimana tokoh-tokoh yang tergabung dalam gerakan Gambut Raya berkontribusi untuk membuat wacana ini memiliki daya tawar di tengah kehidupan masyarakat, media ataupun pemerintahan. Hal ini tentu dapat dipahami bahwa apabila gerakan ini tidak di inisiator oleh tokoh-tokoh

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

elite yang berada pada ruang lingkup pemerintahan, tentu gerakan ini akan kesulitan untuk mencapai *goals* nya. Sehingga adanya kehadiran tokoh-tokoh yang berasal dari pemerintahan maupun politik (elite) merupakan sebuah hal yang penting dan krusial bagi sebuah gerakan pemekaran.

Berdasarkan observasi penulis, tokoh-tokoh yang tergabung dalam Gambut Raya terlibat langsung dengan pembentukan wacana di media, dalam hal ini tokoh-tokoh Gambut Raya aktif menyampaikan perkembangan, tanggapan dan argumentasi tentang pentingnya pembentukan Gambut Raya. Sehingga dalam pembentukan wacana di tingkat lokal, tokoh-tokoh Gambut Raya terbukti mendominasi pemberitaan dan menjadi pihak yang berada di garis terdepan terhadap hal-hal yang menyangkut pembentukan Gambut Raya. Berkaitan dengan posisi itu, penempatan diri sebagai "wakil dari masyarakat/perwakilan masyarakat" juga memainkan peran yang penting dalam psikis pelaksanaan gerakan. Argumentasi ini kemudian menjadikan pihak panitia Gambut Raya yang dalam hemat penulis gambarkan berada pada posisi kelompok mayoritas. Dimana ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Noelle-Neumann (1991) bahwa mereka yang berada dalam kelompok mayoritas memiliki kepercayaan diri untuk menyuarakan pendapat mereka.

Hal ini yang berbanding terbalik dengan sikap pihak elite lokal Kabupaten Banjar yang selama ini terkesan lebih banyak diam, tidak merespon dan tidak menggubris keinginan pemekaran wilayah. Berdasarkan analisa penulis, hal ini dapat dipahami sebagai suatu cara dari pihak-pihak elite lokal di Kabupaten Banjar untuk menghindari perdebatan yang dapat menyebabkan polemik berkepanjangan dan konflik terbuka. Sikap ini juga sebagai cara menjaga citra dihadapan publik dan menghindari kerugian politik dengan kehilangan suara di wilayah 6 (enam) kecamatan, yang mana dalam data BPS Kabupaten Banjar (2022) daerah ini dihuni 213.220 jiwa penduduk. Walaupun tidak bisa menjadi justifikasi bahwa dengan menujukkan opini kontra/menolak terhadap wacana pemekaran Gambut Raya berpengaruh terhadap perolehan suara pemilihan, tetapi tentu ini menjadi pertimbangan politik untuk para kandidat-kandidat yang berlaga di 6 (enam) kecamatan ini untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi merugikan pencalonan politik mereka sendiri. Hal ini yang apabila dihubungkan dengan teori *spiral of silence*, sikap "diam" ini yang memasukkan pihak elite lokal Kabupaten Banjar sendiri dalam spiral keheningan tersebut. Dimana konsekuensi nya adalah penempatan posisi sebagai pihak minoritas berkaitan dengan pemekaran wilayah Gambut Raya di media. Berbeda dengan pihak elite Gambut Raya yang mendominasi pemberitaan, disinilah elite lokal Kabupaten Banjar tidak begitu banyak terlibat dan merespon (baik secara publik/media). Dalam hal ini, Noelle-Neumann (1991) mengatakan mereka yang berada pada posisi minoritas biasanya lebih berhati-hati dan tidak tegas dalam menyampaikan pendapat atau diam.

Melalui sikap diam nya tokoh-tokoh elite lokal Kabupaten Banjar ini kemudian menjadikan tokoh-tokoh elite lokal Gambut Raya lebih mudah untuk melemparkan

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

wacana, karena daya tawar dan konsekuensi yang akan didapatkan lebih rendah karena menguasai argumentasi di ranah media. Seperti rencana yang pernah dilemparkan oleh tokoh-tokoh Gambut Raya yang mengatakan akan memimpin warga untuk melakukan demo apabila Bupati Banjar mengabaikan permintaan audiensi pemekaran (Koranbanjar.net, 2021). Yang mana ini dapat dimaknai bahwa pihak mayoritas (masyarakat) memegang kekuasaan terhadap mereka yang tidak sepakat (minoritas) melalui seperangkat tindakan-tindakan tekanan (Noelle-Neumann, 1991). Simbolisasi dari pengerahan dan penggalangan massa ini sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah wujud penguasaan terhadap wacana (mayoritas) dan merupakan pembuktian dari pihak Gambut Raya bahwa keinginan pemekaran ini bukan hanya keinginan para tokoh-tokoh elite yang ada di panitia, tetapi juga merupakan bagian dari aspirasi masyarakat di 6 (enam) kecamatan.

Walaupun pada prosesnya Bupati Banjar H. Saidi Mansyur menerima dan menyambut kehadiran para tokoh Gambut Raya pada awal Januari 2022, argumentasi tentang pemekaran ini kembali memanas setelah DPRD Kabupaten Banjar H. Muhammad Rofiqi memberikan pernyataan di media bahwa pemekaran wilayah bukan merupakan solusi dalam menghadapi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Banjar. Selain itu Ketua DPRD Kabupaten Banjar tersebut mengatakan bahwa dalam proses pemekaran ini harus melibatkan semua pihak, termasuk ulama. Hal ini yang kemudian menjadi polemik dan menuai berbagai tanggapan termasuk tokoh-tokoh Gambut Raya. Dalam hal ini pihak tokoh Gambut Raya menganggap bahwa apa yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Banjar adalah sebuah kalimat penolakan dan merupakan salah satu bentuk menghalang-halangi proses pembentukan Gambut Raya. Berkaitan dengan hal inilah yang kemudian Noelle-Neumann (1993) sebut sebagai tindakan pihak *the hard core*, dimana *the hard core* merupakan kelompok-kelompok atau individu yang tidak memedulikan akan ancaman ataupun isolasi pihak awam. *The hard core* sendiri merupakan kelompok/individu yang mencoba melawan cara berpikir dominan dengan berbicara melawan opini mayoritas. Dalam hal ini, keberanian untuk menyampaikan pendapat juga berkaitan dengan posisi tokoh bersangkutan sebagai salah satu pimpinan lembaga pemerintahan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga menjadikan opini tokoh tersebut diperhitungkan secara politik dan media.

Pada dasarnya, pemekaran Gambut Raya saat ini praktis hanya memerlukan rekomendasi dan persetujuan pelepasan dari pihak Kabupaten Banjar sebagai kabupaten induk. Sebagai gerakan yang mayoritas di isi oleh tokoh-tokoh yang berada di legislatif tingkat provinsi, tentu kesepakatan-kesepakatan diyakini akan lebih mudah tercapai apabila sudah sampai di tingkat provinsi ketimbang proses yang saat ini berlangsung di tingkat kabupaten induk. Proses juga tidak akan melalui argumentasi perdebatan yang begitu panjang. Proses ke pusat juga sudah dilaksanakan secara informal, hal ini terlihat dari sudah tercatatnya Gambut Raya dan Tanah Kambatang Lima (daerah rencana pemekaran dari Kabupaten Kotabaru) di Dirjen Otonomi Kementerian Dalam Negeri

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

bahwasanya di Provinsi Kalimantan Selatan menginginkan pemekaran wilayah (Hanafi, 2022). Pendekatan terhadap tokoh elite di legislatif pusat juga sudah terjalin, hal ini sesuai dengan pemaparaan tokoh Gambut Raya bahwa ada anggota DPR-RI yang akan menyumbangkan lahan nya yang ada di Kecamatan Gambut seluas 50 hektar untuk dijadikan lokasi perkantoran pemerintah Gambut Raya (Aliando, 2022). Hal ini menandakan bahwa dalam melaksanakan gerakan nya, pihak elite lokal Gambut Raya sudah bergerak jauh kedepan dalam senyapnya untuk mendukung rencana terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) bernama Gambut Raya.

IV. SIMPULAN

Pada gerakan pemekaran wilayah Gambut Raya terdapat keterlibatan dan peran aktif dari pihak elite lokal yang mempunyai karakteristik *spiral of silence*. Terdapat alasan-alasan yang menjadi mendorong keinginan pemekaran, yakni pelayanan birokrasi, isu pembangunan dan kepadatan penduduk. Strategi yang dilaksanakan adalah melakukan pendekatan dengan sosialisasi terhadap masyarakat dan pendekatan dalam bidang media. Hambatan pada gerakan terbagi menjadi dua, internal dan eksternal, internal berkaitan dengan kondisi internal organisasi pemekaran dan eksternal berkaitan dengan relasi dengan kabupaten induk. Dalam kaitannya dengan teori *spiral of silence*, media menjadi salah satu kekuatan terbesar gerakan dimana tokoh-tokoh Gambut Raya terlibat langsung dengan pembentukan wacana di media. Terdapat juga bentuk-bentuk simbolisasi penguasaan wacana yang menjadikan pihak elite lokal Gambut Raya memiliki daya tawar sebagai mayoritas dalam pemekaran wilayah. yang menjadi sumber barang dagangan bagi *pagandeng*. Ketiganya saling terkait dan saling membutuhkan, hubungan antara produsen, distributor dan konsumen. Aktor yang berperan sebagai produsen adalah petani dan pemilik *home industry*, sementara distributornya adalah *pagandeng*, dan konsumennya adalah masyarakat yang mayoritas ibu rumah tangga.

REFERENSI

Aliando, Anas. (26 Februari 2022). Supian HK: Dua Langkah Lagi Gambut Raya Terwujud**.** Retrieved from https://www.gatra.com/news-536804-Kalimantan---supian-hk-dua-langkah-lagi-gambut-raya-terwujud.html

Anugrah, M. Y. M., & Anward, R. J. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Dan Kabupaten Pada Kawasan Metropolitan Banjarbakula. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, *3*(1), 129-143.

Arfianty, Desy. (23 Desember 2019). Pasang Surut Wacana Gambut Raya Serius Atau Sekadar Bargaining Politik. Retrieved from https://www.kanalkalimantan.com/pasang-surut-wacana-gambut-raya-

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

serius-atau-sekadar-bargaining-politik/

Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. *Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan), 35-41.*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, (2022). Kabupaten Banjar dalam Angka 2022. Martapura: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar.

Budhi, S., Hidayah, S., Hamid, I., Aulia, S., & Suwandi, M. A. (2021). Food Security of Banjar People In Facing Climate Change In Sungai Batang Village, Banjar District, South Kalimantan. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, *1*(01), 37-44.

Burhan, R. (2020). Pemekaran sebagai arena konflik Ekonomi: Studi kasus Pada rencana pemekaran Provinsi Luwu Raya. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 24-33.

Eriyanto, E. (2017). Teori Spiral Kesunyian dan Negara Transisi Demokrasi: Sebuah Pengujian di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 13-22.

Fadhilah, Anang. (5 Agustus 2018). Lepas dari Kabupaten Banjar, Gambut Raya Ditarget Berdiri 2022. Retrieved from https://kumparan.com/banjarhits/lepas-dari-kabupaten-banjar-gambut-raya-ditarget-berdiri-2022-1533295225512257978/full

Giddens, Anthony. (1993). Sociology. *Oxford: Polity Press*.

Hanafi, Imam. (23 Januari 2022). DOB Tanah Kambatang Lima Murni Keinginan Masyarakat. Retrieved from https://kalsel.antaranews.com/berita/308213/dob-tanah-kambatang-lima-murni-keinginan-masyarakat

Hendra, Y. (2019). Spiral of Silence Theory Versus Perkembangan Masyarakat suatu Penjelasan dan Kritik Teori. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, *5*(2), 106-117.

Huda, N. matul, & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(2), 238–258*.

Husaini, Ahmad. (5 Agustus 2018). Terganjal Aturan, Pemekaran Gambut Raya Tidak Bisa Tancap Gas. Retrieved from https://jejakrekam.com/2018/08/05/terganjal-aturan-pemekaran-gambut-raya-tidak-bisa-tancap-gas/

Khaitami, Mustain. (27 September 2016). Tokoh Gambut Raya Optimistis 3 Tahun Terbentuk. Retrieved from https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/09/27/tokoh-gambut-raya-optimistis-3-tahun-terbentuk

Koranbanjar.net. (29 Desember 2021). Jika Bupati Banjar Abaikan Audensi Pemekaran, Warga Gambut Raya Akan Demo. Retrieved from https://koranbanjar.net/jika-bupati-banjar-abaikan-audensi-pemekaran-warga-gambut-raya-akan-demo/

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

Meyer, Thomas. (2012). Kompromi: Jalur Ideal Menuju Demokrasi. *Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)*.

Morissan. (2013). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenada. Media Grup.

Mosca, Gaetano. (1939). The Rulling Class. *New York: McGraw Hill*.

Muqoyyidin, A. W. (2016). Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi, 10(2), 287-310*.

Noelle-Neumann, E. (1974). The Spiral of Silence A Theory of Public Opinion. *Journal of communication, 24(2), 43-51*.

Noelle-Neumann, E. (1991). The Theory Of Public Opinion: The Concept Of The Spiral Of Silence. *Annals of the International Communication Association*, *14*(1), 256-287.

Noelle-Neumann, E. (1993). *The spiral of silence: Public opinion--Our social skin*. University of Chicago Press.

Nurita, Dewi. (12 April 2022). Rapat Paripurna Setujui Tiga RUU DOB Papua Jadi Usul Inisiatif DPR. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1581262/rapat-paripurna-setujui-tiga-ruu-dob-papua-jadi-usul-inisiatif-dpr/full&view=ok

Pareto, Vilfredo. (1935). The Mind and Society. *New York: Harcourt, Brace and World, 169-170.*

Radar Banjarmasin. (30 September 2017). Berawal Tahun 90-an, Ini Nih Cerita Panjang Gambut Raya. Retrieved from https://kalsel.prokal.co/read/news/11485-berawal-tahun-90-an-ini-nih-cerita-panjang-gambut-raya/12

Rahmawati, R., Wibowo, B. Y., & Musahwi, M. (2018). Spiral of silence theory dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, *4*(1), 13-24.

Rohmah, N. S. (2018). Elit Dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 90-105.*

Santoso, Purwo, Dkk. 2006. *Perjuangan Menuju Puncak Kajian Akademik Rencana Pembentukan Kabupaten Puncak Pemekaran Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua*. Yogyakarta: Polgov Research Centre For Politics and Government FISIPOL UGM.

Suara Kalimantan. (5 Agustus 2018). Supian HK Pimpin Penuntutan Pemekaran Gambut Raya. Retrieved from https://www.suarakalimantan.com/2018/08/05/supian-hk-pimpin-panlak-gambut-raya/

Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Utomo, F., & Pasha, J. A. (2020). Politik Etnosentris Semu Dalam Kasus Upaya Pemekaran Provinsi (Studi Pada Gerakan Pemekaran Provinsi Cirebon). *Empower: Jurnal*

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 2 Mei 2022

Pengembangan Masyarakat Islam, *5*(1).

Widodo, Hari. (26 September 2016). Ini Penyebab Wacana Gambut Raya Tahun 1999 Gagal. Retrieved from https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/09/26/ini-penyebab-wacana-gambut-raya-tahun-1999-gagal

Widyanta, A. B. (2004). *Problem Modernitas Dalam Kerangka Sosiologi Kebudayaan Georg Simmel*. Yogyakarta : Cinelaras Pustaka Rakyat Cerdas.